

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 12

Kompas	Kalteng Pos <input checked="" type="checkbox"/>	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Dugaan Penyelewengan Dana Desa Dilaporkan ke Kejaksaan

PALANGKA RAYA- Asang Triasa kontraktor pelaksana dari kegiatan pembangunan jalan tembus antar desa yang menghubungkan Kelurahan Tumbang Sanamang sampai Desa Kiham Batang, Kecamatan Katingan Hulu, kabupaten Katingan akhirnya benar benar menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan penyelewengan penggunaan anggaran

dana desa tahun anggaran 2020 yang terjadi di sembilan desa yang berada di Kecamatan Katingan Hulu kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng.

Laporan pengaduan ini dikatakan pihak H Asang, dikhususkan menyangkut penggunaan anggaran dana desa terkait proyek pekerjaan pembangunan jalan tembus antar desa Kelurahan dari Tumbang Sanamang sampai desa Kiham Batang. Anggaran diduga diselewengkan oleh sejumlah oknum aparat desa di wilayah tersebut.

Informasi terkait pengaduan laporan dari pihak Asang Triasa di Kejaksaan Tinggi Kalteng ini disampaikan sendiri oleh Asang Triasa selaku pelapor dalam konferensi pers dengan wartawan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Parlin Hutabarat selaku pihak kuasa hukum dari Asang yang mendampingi saat membuat laporan terkait dugaan penyelewengan anggaran dana desa tersebut mengatakan kepada sejumlah awak media bahwa laporan pihaknya ke Kejaksaan Tinggi Kalteng tersebut telah dilakukan pihaknya pada Selasa (2/2).

"Jadi kita pada 2 Februari kemarin sudah resmi mengajukan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah," ucap Parlin Hutabarat.

Adapun dugaan adanya penyelewengan dana desa yang dilaporkan tersebut, H Asang ke pihak Kejaksaan Tinggi ini adalah aparat desa yang diketahui belum melunasi pembayaran proyek pekerjaan pembuatan jalan tembus dan jembatan kayu yang menghubungkan sebelas desa yang dikerjakan oleh H Asang tahun 2020 tersebut.

Disebutkan ke sembilan desa yang belum melunasi kewajibannya kepada kontraktor adalah Desa Sei Nanjan, Desa kuluk Sepangi, Desa Rantau Puka, Desa Kiham Batang, Desa Tumbang Kuai, Desa Dehes

Asem, Desa Rangan Kawit, Desa Rantau Bahal dan Desa Tumbang Kabayan. Semua desa tersebut berada di kecamatan Katingan Hulu, kabupaten Katingan.

Parlin juga menduga adanya penyelewengan dana anggaran desa yang semestinya untuk pelunasan proyek pekerjaan yang dilaksanakan oleh kliennya namun demi kepentingan lain oleh pihak aparat desa tersebut.

Diterangkan oleh Parlin bahwa dalam laporan pengaduan mereka kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kalteng terkait dugaan tindak pidana korupsi menyangkut penyelewengan anggaran dana desa terutama yang menyangkut penggunaan anggaran untuk proyek pembuatan jalan tembus antar desa dan jembatan kayu di sebelas desa tersebut, pihaknya juga menyampaikan sejumlah informasi dan temuan mereka kepada pihak kejati Kalteng.

Dikatakan Parlin salah satu temuan penting yang disampaikan kepada pihak Kejati kalteng adalah bahwa bila selama ini para kepala desa di sembilan desa yang diketahui belum membayar pelunasan pembayaran hasil pekerjaan pembangunan jalan tembus antar dengan alasan anggaran desa telah habis di gunakan untuk biaya bantuan covid maka setelah ditelusuri ternyata hal tersebut tidaklah benar.

"Berdasarkan isi laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2020, yang di sampaikan oleh aparat di sembilan desa ini, ternyata pihak aparat di dalam laporan nya APBDes menyangkut penggunaan dana desa tahun 2020 semuanya, melaporkan bahwa proyek pekerjaan pembangunan jalan tembus antar desa sudah mereka bayar lunas," ucap Parlin sambil menyebutkan kan pihak nya mendapatkan laporan terkait pertanggung jawaban APBDes ke sembilan desa tersebut dari website sistem informasi desa milik Kementerian Desa Pembangu-

Sandy

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

nan daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Hal tersebut dikatakan Parlin tentunya sangat berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan sendiri dimana H.Asang selaku pelaksana proyek sampai saat ini belum memperoleh pelunasan pembayaran pekerjaan pembuatan jalan tembus antar desa dan jembatan kayu tersebut yang masih kekurangan bayar sebesar Rp 2.112.780.000,- (dua miliar seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

"Padahal faktanya pekerjaan itu belum dibayarkan secara benar , tetapi dilaporkan yang ada di sistem informasi desa ini ,dikatakan sudah dibayarkan semua," ucap pria berkacamata ini sambil menambahkan bahwa berdasarkan laporan tersebut pihak nya menduga adanya penyelewengan dana yang seharusnya untuk membayar pelunasan biaya pekerjaan pembuatan jalan tembus dan jembatan kayu tersebut, untuk kepentingan lain oleh pihak oknum aparat desa.

Bahkan disebutkan Parlin juga ada desa yang mencatatkan di dalam laporan keuangan desa tersebut nilai kontrak pekerjaan pembuatan jalan desa tmelebihi dari nilai kontrak yang sebenarnya.

"Bahkan seperti laporan di desa Dehes Asem terekam data untuk proyek pembangunan jalan desa tercantum nilai mencapai Rp 525 juta, padahal kita tahu nilainya tidak sampai seperti itu," jelas parlin yang diiyakan oleh H Asang sendiri.

Bahkan berdasarkan laporan yang di peroleh dari website Sistem Informasi Desa milik kementerian Desa ini yang bisa diakses publik secara terbuka ini diketahui juga bahwa pihak aparat desa di sembilan desa tersebut juga sudah menyampaikan dalam laporan nya, bahwa pihak desa sudah menyiapkan juga mata Anggaran untuk Bansos covid 19 di masing masing desa

tersebut. Dan berdasarkan laporan keuangan tersebut dana bantuan untuk Bansos covid 19 tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan dana anggaran untuk pembuatan jalan tembus antar desa tersebut.

Karena nya pihak H.Asang melalui kuasa hukumnya meminta kepada pihak Kejati Kalteng untuk memeriksa tuntas terkait laporan penggunaan anggaran dana desa di desa desa tersebut.

"Harapan kami terkait Laporan kami ini akan ada tindak lanjut dari kejaksaan tinggi , setidaknya tidaknya melakukan penyelidikan kebenaran dari laporan kami maupun laporan pihak desa terkait penggunaan dana desa tersebut apakah lapiran tersebut menggunakan data yang paling atau dana desa tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi,"ucap Parlin Hutabarat lagi Sambil menambahkan bahwa surat laporan pengaduan mereka ke Kejaksaan Tinggi Kalteng itu juga di tembuskan kepada pihak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung bidang Pengawasan di Kantor Kejaksaan Agung RI.

Sementara itu H. Asang sendiri dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa awalnya dirinya berharap ada penyelesaian yang baik dari pihak aparat pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan pelunasan pembayaran pekerjaan pembuatan jalan tembus dan jembatan kayu yang menghubungkan 11 desa yang dikerjakannya.

"Tetapi ternyata memang tidak ada etikat baik dari aparat di desa desa itu , supaya mereka mau membayar sisa pembayaran pekerjaan kita, makanya kita terpaksa membawa kasus ini ke jalur hukum," terang H,Asang Triasa yang mengaku dirinya sangat peduli dengan kegiatan pembangunan di desa desa tersebut karena dirinya merupakan putra asli setempat. (sja/ala)